

# PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK BERBASIS MASYARAKAT DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

**Panji Purnama**

*Universitas Galuh Ciamis*  
E-mail : panjipurnama1910@gmail.com

## ABSTRAK

*Latar belakang penelitian ini belum optimalnya pelaksanaan pembangunan fisik berbasis masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik berbasis masyarakat belum optimal, hal ini dapat dilihat dari 7 dimensi yang dijadikan tolok ukur, 4 diantaranya belum berjalan dengan maksimal. Dalam dimensi penyadaran dimana belum adanya pendidikan serta kegiatan penyuluhan yang intensif dari pemerintah desa mengenai pembangunan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya program pembangunan, masih rendahnya sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan, kurang tersedianya fasilitas dalam melaksanakan proses pembangunan, belum adanya upaya pemecahan masalah yang menyangkut kelemahan dan ancaman dalam pembangunan, belum adanya strategi untuk mengantisipasi kelemahan dalam proses pembangunan, belum rutinnya pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, serta kurangnya penerapan teknologi di daerah pedesaan.*

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan Pembangunan Fisik, Masyarakat.*

## PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan dari saat itulah bangsa Indonesia memulai pembangunan yang sebenarnya. Tujuan dari pembangunan yaitu tidak lain adalah mensejahterakan rakyat atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar dari

Sabang sampai Merauke dan terdiri dari bermacam-macam suku dan kebudayaan. Tidaklah mudah bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan dengan keadaan yang beranekaragam. Tentu pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan. Dalam hal ini, kegagalan atau keberhasilan pembangunan sangat

tergantung dari pihak pelaksana (pemerintah dan masyarakat). Pemerintah dalam merealisasikan suatu kebijakan harus mendapat dukungan dari rakyatnya, karena tanpa dukungan dari masyarakat suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan juga sangat menentukan kelancaran pembangunan, yaitu moral yang dimiliki oleh para pejabat. Sebagai contoh banyak para pejabat yang melakukan korupsi, sehingga dana-dana yang sebenarnya untuk pembangunan, sebagian masuk kantong para pejabat. Hal tersebut tidak kita sadari dapat menyebabkan ketidاكلancaran pembangunan.

Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang pembangunan fisik khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: "Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program".

Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka

Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

(2) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembangunan fisik yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah pembangunan fisik yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak, ini adalah gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksana pembangunan bukan hanya

dibebankan oleh pemerintah saja namun masyarakat ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerjasama agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan pedesaan menghasilkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini karena 80% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya. Agar gerak dan arah pembangunan desa senantiasa tertuju kepada kepentingan masyarakat di desa maka perlu adanya prinsip pokok kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Prinsip pokok tersebut merupakan pedoman dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan.

Maka dari itu, pembangunan sangatlah penting untuk dilaksanakan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Misalnya dengan dibuatnya atau diperbaikinya akses jalan menjadi jalan yang layak untuk digunakan maka memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan kesehariannya misalnya berangkat bekerja, pergi ke sekolah dan lain-lain. Adapun misalnya pembangunan kantor desa, kantor desa merupakan identitas suatu desa bahwa desa tersebut mempunyai tempat yang siap melayani masyarakat dan siap untuk membantu masyarakat. Maka dari itu kantor yang layak memang sangat dibutuhkan agar menunjangnya sarana untuk masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa.

Dalam pembangunan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dalam terwujudnya pembangunan yang baik dan tepat sasaran salah satu faktornya adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah desa harus terjalin kerja sama yang baik dan harmonis agar pembangunan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Seperti yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa "Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong".

Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis merupakan desa yang terdiri dari 6 Dusun, 17 RW dan 51 RT. Di Desa Sukamulya juga dilaksanakan pembangunan fisik yang diantaranya pengecoran jalan, pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah), pembangunan TPU (Tempat Pemakaman Umum), pembuatan kirmir jalan yang merupakan jalan lingkungan desa dan perenovasian gedung desanya sendiri yaitu perenovasian wc dan perenovasian aula desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik berbasis masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum adanya upaya pemecahan masalah dalam pembangunan. Misalnya: Dalam mengatasi ketidaksesuaian target pembangunan dengan realisasi di lapangan, seperti pembangunan jalan gang Cikacang baru 50%, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) baru 70%, pengaspalan jalan poros desa baru 80%, pengecoran jalan Cikacang baru 60%, pengecoran jalan Cianggirang baru 70%, pembuatan kirmir jalan baru

50%, pembangunan renovasi desa baru 80%, dan pembuatan wc kantor desa baru 90%. Dimana program-program pembangunan tersebut seharusnya selesai pada akhir September 2021.

2. Belum adanya antisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam pembangunan. Misalnya: adanya perubahan alokasi dana desa yang didapat pada tahun 2020, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan namun berpindah penggunaannya yaitu diprioritaskan untuk mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik berbasis masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?".

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses

yang disebut dengan perencanaan pembangunan.

Listyaningsih (2014:18) mengemukakan bahwa “Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik”.

Menurut Theresia, et.al (2015:4 ) bahwa: Pembangunan adalah sesuatu yang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pembangunan mensyaratkan melibatkan atau partisipasi seluruh warga pembangunan masyarakat. Sejak pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga masyarakatnya.

Menurut Adisasmita (2013:134) tujuan pembangunan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: Memberikan pelayanan kepada masyarakat perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pelayanan sosial. Sasaran program ini adalah tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, pelayanan sosial, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Selanjutnya, Lippit (Theresia, et.al, 2015:218) merinci tahapan

kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat ke dalam 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

1. Penyadaran;
2. Menunjukkan adanya masalah;
3. Membantu pemecahan masalah;
4. Menunjukkan pentingnya perubahan;
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi;
6. Memproduksi dan publikasi informasi; dan
7. Melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2010:234) menyatakan bahwa:

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Sukamulya (1 orang), Seksi Kesejahteraan (1 orang), Seksi Pemerintahan (1 orang), dan

Masyarakat Desa Sukamulya (2 orang). Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik berbasis masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ditinjau berdasarkan 7 (tujuh) dimensi tahapan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menurut Lippit (Theresia, et al, 2015:218), yaitu sebagai berikut:

### **1. Penyadaran**

a. Adanya kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan sejauh ini belum terlihat, dimana pemerintah desa tidak mengadakan pendidikan informal kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya keilmuan dari pihak pemerintah desa.

Sebagaimana menurut Notoadmodjo (2003:77) “Pendidikan formal dalam suatu organisasi

merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan”.

Dengan demikian, kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan oleh Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Notoadmodjo, karena sejauh ini masyarakat belum mendapatkan pendidikan intensif dari pemerintah desa mengenai pembangunan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya waktu dari pemerintah desa sehingga kegiatan pendidikan mengenai pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan sejauh ini belum terlihat, hal tersebut dibuktikan dari belum adanya kegiatan penyuluhan yang diterima oleh masyarakat Desa Sukamulya dikarenakan pemerintah desa mengalami keterbatasan waktu untuk mengadakan penyuluhan sehingga kesadaran masyarakat kurang

terbentuk dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana menurut Subejo (2010) bahwa:

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan oleh Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Subejo, karena sejauh ini masyarakat belum mendapatkan penyuluhan dari pemerintah desa mengenai pembangunan. Maka dari itu, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara bertahap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Menunjukkan Adanya Masalah**

a. Adanya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan

kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan memang dalam pemanfaatan hasil pembangunan secara maksimal dirasakan oleh masyarakat, adapun dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh desa adalah pembangunan jalan sebagai sarana transportasi masyarakat dalam beraktifitas dan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana menurut Ruky (2003:104) bahwa:

Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi , serta bertahan cukup lama dalam diri manusia.

Dengan demikian, sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ruky, karena sumber daya manusia Desa Sukamulya belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan. Maka dari itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan harus didasari cara berfikir masyarakat terhadap situasi yang dihadapi.

b. Adanya sumber daya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten

Ciamis dalam menyediakan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam memelihara hasil pembangunan telah dilaksanakan secara maksimal dimana tingkat kesadaran masyarakat sudah baik. Ditandai dengan adanya gotong royong seperti pembersihan selokan, pembersihan jalan, dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat Gie (2000:25) bahwa:

Menggerakkan segenap sarana, dalam arti menyiapkan pengadaan, mengatur pemakaian, menetapkan langkah dan menyempurnakan daya guna benda, biaya, alat, bangunan, metode dan sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sumber daya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Gie, karena pembangunan fisik di Desa Sukamulya telah ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai guna mempermudah kegiatan pembangunan tersebut.

c. Adanya sumber daya aksesibilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sukamulya

Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam menyediakan sumber daya aksesibilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam realisasinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga kegiatan tersebut tidak selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana menurut Tjiptono (2014:159) bahwa:

Aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu: Jarak; akses ke tempat lokasi, Transportasi; arus lalu-lintas.

Dengan demikian, sumber daya aksesibilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tjiptono, karena dalam melaksanakan proses pembangunan terkendala oleh akses lokasi.

d. Adanya upaya pemecahan masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternal dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam upaya pemecahan masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternal dalam



pembangunan pemerintah desa melakukan musyawarah sebagai bentuk upaya pemecahan suatu permasalahan, baik itu masalah internal maupun eksternal.

*Membantu pemecahan masalah*, sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.

Dengan demikian, upaya pemecahan masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternal dalam pembangunan oleh Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Lippit, karena sampai sejauh ini belum terdapat upaya pemecahan masalah yang menyangkut kelemahan dan ancaman dalam pembangunan. Maka dari itu perlu adanya analisis akar masalah serta pilihan alternatif sehingga kendala yang dihadapi dapat diselesaikan.

### **3. Membantu Pemecahan Masalah**

a. Adanya analisis kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, dikarenakan pengalokasian beberapa anggaran untuk hal lain.

Sebagaimana menurut Mardilis (2001) bahwa:

Sebagaimana menurut Menurut Lippit (Theresia, et.al, 2015:218) merinci tahapan kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat salah satunya adalah :

Kelemahan merupakan keterbatasan atau defisiensi sumber, keterampilan atau kemampuan yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan, fasilitas, sumber keuangan, kemampuan modal, keterampilan pemasaran dan citra merk dapat menjadi sumber- sumber kelemahan.

Dengan demikian, analisis kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Mardilis, karena belum adanya analisis kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan sehingga perlu kinerja serta kemampuan yang serius. Maka dari itu, masyarakat sebagai kontrol terhadap pemerintah tidak terlepas dari itu semua.

b. Adanya analisis peluang dan ancaman dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa analisis peluang dan ancaman dalam pembangunan sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah desa selalu meminta dan melibatkan kehadiran dari masyarakat supaya kegiatan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana menurut Menurut Freddy (2013), bahwa :

Analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*)

dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

Dengan demikian, analisis peluang dan ancaman dalam pembangunan belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Freddy, karena sampai sejauh ini ancaman sangat riskan terjadi di dalam proses pembangunan. Apalagi terkait biaya operasional sebuah pembangunan. Maka dari itu, pemerintah desa melakukan transparansi untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

#### **4. Menunjukkan pentingnya perubahan**

a. Adanya antisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa selama ini belum ada perubahan-perubahan dalam pembangunan. Semua berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Menurut Frutche (Theresia, et.al, 2015:282-283) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

1. Observasi (pengamatan)
2. Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu
3. Pengambilan keputusan atau penilaian atas obyek yang diamati

Dengan demikian, antisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam pembangunan belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Frutche, karena dalam realisasinya pengamatan dilakukan hanya beberapa kali saja. Maka dari itu perlu adanya pengamatan intensif agar proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.

b. Adanya penyesuaian pembangunan dengan perubahan kondisi lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa belum adanya penyesuaian pembangunan dengan perubahan kondisi lingkungan.

Menurut Direktorat Jendral pembangunan desa dalam (Moeljarto, 2007:40) bahwa:

1. adanya perencanaan yang komprehensif dan integratif
2. pelaksanaan pembangunan yang terkordinir secara mantap
3. perkembangan desa-desa berpedoman tata desa yang baik
4. adanya usaha-usaha kaderisasi pembangunan desa
5. peningkatan pembangunan prasarana dan pemenuhan sarana kerja
6. adanya usaha-usaha untuk penerapan teknologi yang tepat di daerah pedesaan

Dengan demikian, penyesuaian pembangunan dengan perubahan kondisi lingkungan belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Direktorat Jendral pembangunan desa dalam Morljarto, karena dalam

penerapan teknologi di daerah pedesaan belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang belum mendukung proses pembangunan seperti halnya akses menuju lokasi pembangunan tersebut.

## **5. Melakukan Pengujian dan Demonstrasi**

- a. Adanya kegiatan sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sosialisasi dari pemerintah desa diwakilkan oleh LPM yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat.

Menurut Dahama dan Bhatnagar (Theresia, et.al, 2015:258-263) bahwa: Setiap penyusunan program pembangunan perlu memperhatikan filosofi program pembangunan, salah satunya yaitu: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan program, sehingga seluruh rangkaian kegiatan sejak perencanaan sampai pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh orang luar.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Dahama dan Bhatnagar, karena adanya kegiatan sosialisasi mengenai program pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukamulya kepada masyarakat. Yaitu dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial, seperti grup whatsapp ataupun disebarakan melalui musyawarah desa

mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya.

- b. Adanya hasil yang dicapai dari inovasi pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan masyarakat akan merasakan hasil dari program tersebut. Salah satunya yaitu perubahan infrastruktur, dengan adanya kegiatan tersebut merupakan hasil dari inovasi sebelumnya.

Sebagaimana menurut Nurdin (2016) bahwa:

Inovasi ialah sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain.

Dengan demikian, hasil yang dicapai dari inovasi pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nurdin, karena Pemerintah Desa Sukamulya sejauh ini selalu menciptakan inovasi terutama dalam program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

## **6. Memproduksi dan Publikasi Informasi**

- a. Adanya pengaruh perkembangan teknologi terhadap karakteristik masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa karakteristik masyarakat saat ini sangat berubah disebabkan perkembangan zaman. Namun tidak dibarengi dengan

pengetahuan dari masyarakatnya sendiri, dikarenakan masih banyak yang mudah termakan berita bohong/hoax. Misalnya pembangunan di desa yang mangkrak semenjak pandemi, masyarakat yang mudah termakan berita bohong akan meyakini bahwa pembangunan di desa mereka dikarenakan kerja pemerintah desa yang sewenang-wenang, namun dalam kenyataannya pemerintah desa itu sendiri mengalokasikan anggaran pembangunan untuk proses pemulihan pandemi.

Sebagaimana menurut Menurut Lippit (Theresia, et.al, 2015:218) merinci tahapan kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat salah satunya adalah:

*Memproduksi dan publikasi informasi*, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll.) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya.

Dengan demikian, pengaruh perkembangan teknologi terhadap karakteristik masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Lippit, karena masyarakat saat ini dengan adanya perkembangan teknologi sangat mempengaruhi karakteristik atau

perilaku dalam kehidupan bernegara.

b. Adanya media publikasi yang digunakan dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa media publikasi dalam pembangunan hanya berupa baliho yang tertera di sekitaran Kantor Pemerintah Desa Sukamulya.

Sebagaimana menurut Astika (2008) bahwa:

Publikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyebarkan informasi bermanfaat dalam apapun misalkan itu tulisan, video, foto dan lain-lain sebagainya kumpulan publikasi ilmiah. Ia juga memaknai bahwasanya publikasi tersebut bisa digunakan sebagai sarana iklan atau promosi sehingga masyarakat menjadi tertarik.

Dengan demikian, media publikasi yang digunakan dalam pembangunan telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Astika, karena dalam melaksanakan program pembangunan tidak terlepas dari media publikasi. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sukamulya menggunakan banner untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung.

## **7. Melaksanakan Pembangunan Berbasis Masyarakat**

a. Adanya aksesibilitas informasi bagi masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pemerintah desa tetap melakukan tugasnya, yaitu melakukan perubahan salah satunya dengan memberikan

informasi terkait program pembangunan kepada masyarakat seperti pembuatan papan informasi atau banner mengenai APBDes. Sebagaimana menurut Menurut Lippit (Theresia, et.al, 2015:218) merinci tahapan kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat salah satunya adalah:

Pembangun Berbasis Masyarakat, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung- gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

Dengan demikian, aksesibilitas informasi bagi masyarakat dalam pembangunan telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Lippit, karena sampai sejauh ini pemerintah desa dalam melaksanakan program senantiasa mengadakan musyawarah bersama pihak-pihak terkait juga masyarakat sehingga informasi tersebut bisa langsung tersampaikan oleh kelompok lapisan bawah (*grassroots*).

b. Adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa selama ada kegiatan proses pembangunan, masyarakat selalu aktif dan berpartisipasi dari awal sampai akhir. Misalnya masyarakat senantiasa

mengadakan gotong royong secara rutin selama proses pembangunan tersebut dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1993:207) bahwa:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tjokroamidjojo, karena selama ini dalam melaksanakan proses pembangunan masyarakat selalu berperan aktif di dalamnya. Sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

c. Adanya penguatan kapasitas SDM dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dengan ikut dalam proses pembangunan warga masyarakat akan lebih terbuka pola pikirnya, dan menjadi faktor utama keberhasilan dalam proses pembangunan.

Menurut Grindle (Haryono, et al, 2012:52) bahwa:

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM dalam pembangunan

telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Grindle, karena Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam tercapainya proses pembangunan. Maka dari itu strategi pembangunan dengan fokus utama penguatan sumber daya manusia agar memiliki keterampilan dan unggul dalam kontribusi program pembangunan.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Berbasis Masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, masih terdapat beberapa dimensi yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, dari 7 dimensi yang dijadikan tolok ukur, 4 diantaranya belum berjalan dengan maksimal. Dalam dimensi penyadaran dimana belum adanya pendidikan serta kegiatan penyuluhan yang intensif dari pemerintah desa mengenai pembangunan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya program pembangunan, masih rendahnya sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan, kurang tersedianya fasilitas dalam melaksanakan proses pembangunan, belum adanya upaya pemecahan masalah yang menyangkut kelemahan dan ancaman dalam pembangunan, belum adanya strategi untuk mengantisipasi kelemahan dalam proses pembangunan, belum rutinnya pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan

pembangunan, serta kurangnya penerapan teknologi di daerah pedesaan. Hambatan yang muncul yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ataupun masukkan mengenai permasalahan yang ada di lingkup masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, masih adanya keterbatasan masyarakat mengenai kesediaan waktu untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil dari pembangunan yang telah dilakukan. Maka upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat oleh pemerintah desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat mengenai keterlibatan masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan ataupun pelaksanaan pembangunan sangatlah berperan penting, kemudian adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat serta upaya untuk menumbuhkan kembali rasa gotong-royong masyarakat dalam suatu kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmata, R. 2013. *Pembangunan perdesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur*

- Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astika. 2008. *Best Practice Penelitian Kualitatif & Publikasi Ilmiah*. Kediri: Cakrawala.
- Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Haryono. 2012. *Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardilis. 2001. *Evaluasi pembelajaran*. Surabaya: University Press.
- Moeljarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Notoatmodjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuridin. 2016. *Strategi Inovasi dan Kinerja Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Ruky. 2003. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Subejo. 2010. *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Extention.
- Theresia, A., et al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono. 2014. *Service, Quality & Satisfaction*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Tjokroamidjojo. 1993. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.